



BAHAN AJAR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

HUKUM INDUSTRI

Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.
Dosen Tetap FH UKI





BAHAN AJAR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

HUKUM INDUSTRI

Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.

Dosen Tetap FH UKI



HUKUM INDUSTRI

Penulis:

Jimmy Simanjuntak

ISBN:

978-623-8737-59-1

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta - 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Bahan Ajar yang berjudul “***Hukum Industri***”.

Perkembangan dunia industri saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, sejalan dengan Revolusi Industri 5.0 dan kemajuan teknologi. Tentu hal tersebut tidak lepas dari aturan-aturan sebagai sarana pendukung berkembangnya dunia industri. Terkait hal tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur mengenai kegiatan industri, dengan tidak mengesampingkan disiplin hukum lainnya.

Dalam membangun usaha Industri, bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Perindustrian namun lebih dari itu Hukum Industri mencakup kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan Industri termasuk namun tidak terbatas yaitu dalam Undang-Undang Ketenegakerjaan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan terkait lainnya. Maka dalam menjalankan usaha Industri, dirasa perlu untuk memahami secara keseluruhan sekumpulan peraturan perundang-undangan tertentu tersebut yang berkaitan erat dengan Industri.

Bahan Ajar Hukum Industri ini belum banyak digunakan di Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Oleh karena itu, Bahan Ajar Hukum Industri ini diharapkan dapat dijadikan buku pegangan dalam proses belajar mengajar guna mempersiapkan mahasiswa yang lulus dari Fakultas Hukum memiliki pemahaman terkait hal apa saja yang harus dipenuhi dalam memberikan pendapat hukum/*legal opinion* ataupun konsultasi hukum terkait dengan pembentukan kegiatan-kegiatan industri di berbagai sektor.

Jakarta, Maret 2025

Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PENDAHULUAN.....	3
BAB I Industri.....	5
1. Definisi Industri.....	5
2. Perkembangan Perindustrian di Indonesia	7
BAB II Hukum Industri di Indonesia	11
1. Definisi Hukum Industri	11
2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perindustrian	12
3. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Ketenagakerjaan	14
BAB III Perizinan Berusaha.....	27
1. Jenis-Jenis Usaha Industri.....	27
2. Pengajuan Perizinan Berusaha	30
3. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).....	34
BAB IV Kawasan-Kawasan Industri di Indonesia.....	42
1. Kawasan Industri.....	42
2. Kawasan Ekonomi Khusus	46
3. Kawasan Berikat dan Kawasan Berikat Nusantara.....	58
4. Pusat Logistik Berikat	67
5. Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas.....	69

BAB VI Perbandingan Fasilitas Berbagai Kawasan-Kawasan Perindustrian	73
BAB VII Pembangunan Industri Berwawasan Lingkungan.....	96
1. Dampak Pembangunan Industri Terhadap Lingkungan.....	96
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).....	102
a. Peran dan Fungsi	102
b. Ruang Lingkup dan Kriteria AMDAL	109
c. Perolehan Izin Lingkungan.....	111
d. Penyusunan AMDAL.....	112
BAB VIII Perbandingan Hukum Industri di Indonesia dengan Negara Lain.....	122

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asikin, Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Hasibuan, Nurimansjah, *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli dan Regulasi* (Jakarta: LP3ES, 1993).

Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030?*, (Yogyakarta: CV. ANDI, 2007).

Machmud, Ari, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016).

Sadono, Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Sandy, I Made, *Republik Indonesia Geografi Regional* (Jakarta: Puri Margasari, 2010).

Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 1992) Cet. 10.

Sudarman, Ari, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 1990).

Sudarwanto, Dr. AL. Sentot, et al, *Hukum Perindustrian Indonesia* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019).

Peraturan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024
tentang Perwilayahan Industri

Jurnal

Dwi Febriyanti, et al, "Fungsi AMDAL Dalam
Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran
Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta
Kerja", *Widya Pranata Hukum Vol. 3 No. 2*,
September 2021.

Internet

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Republik Indonesia, "Tentang KEK Dewan
Nasional," tanggal akses 12 Juli 2024,
<https://kek.go.id/id/about/national-council>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Kawasan
Berikat," tanggal akses 12 Juli 2024,
[https://bckanwiljakarta.beacukai.go.id/qa-
kawasan-berikat/](https://bckanwiljakarta.beacukai.go.id/qa-kawasan-berikat/)

Haryana A. Pusat Logistik Berikat, *Upaya Menekan
Biaya Logistik Nasional*, September 2016.

Kementerian Investasi/BKPM, “Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektrik,” tanggal akses 24 Juli 2024, <https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=kesesuaian-ruang&page=1>.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Dampak Positif Kawasan Ekonomi Khusus,” tanggal akses 10 Juli 2024, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Dampak-Positif-Kawasan-Ekonomi-Khusus>

Nandy, ‘Pengertian AMDAL: Sejarah, Manfaat, Tujuan Dan Jenisnya’ (*Gramedia Blog*) <<https://www.gramedia.com/literasi/amdal/>>

Tim Hukumonline, ‘Tujuan, Manfaat, Dan Dasar Hukum Pelaksanaan Amdal’ *Hukumonline* (18 March 2023), <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-pelaksanaan-amdal-lt61f096a74e0ca> >

Sumber Lainnya

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045*, 2019.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Republik Indonesia, *Laporan Perkembangan
Kawasan Ekonomi Khusus*, 31 Desember 2023.



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-8737-59-8



9

786238

737598